

# **GEOSTRATEGI ANGKATAN LAUT INDONESIA: MEMBANGUN KEKUATAN BAWAH PERMUKAAN SEBAGAI CENTER OF GRAVITY PERTAHANAN NEGARA**

## **INDONESIAN NAVY GEOSTRATEGY: BUILDING UNDER SURFACE STRENGTH AS A CENTER OF GRAVITY FOR STATE DEFENSE**

Ican Wahyu Rizkiana, Lukman Yudho Prakoso, Aries Sudiarso

STRATEGI PERTAHANAN LAUT, FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN, UNIVERSITAS  
PERTAHANAN

(ican.rizkiana@gmail.com, lukman.prakoso@outlook.com, aries.25st@yahoo.com)

**Abstrak**—Ditemukannya UUV (*Unmanned Underwater Vehicle*) asing berupa seaglider sebanyak tiga kali di wilayah perairan Indonesia mengisyaratkan ancaman kedaulatan negara. Indonesia dengan lima pilar Poros Maritim Dunia (PMD)-nya masih berkuat dalam isu-isu ancaman kelautan yang kerap muncul dalam bentuk pelanggaran batas wilayah, pencurian hasil laut, dan aktivitas ilegal lainnya. Sebagai negara kepulauan dengan luasnya gerbang perbatasan berupa laut menjadikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kerap sulit untuk dikontrol. Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar membutuhkan perhatian negara dalam rangka menciptakan perlindungan dari ancaman kedaulatan di wilayah laut nusantara. Bawah permukaan laut termasuk dasar laut merupakan komponen landas kontinen yang perlu pengawasan, mengingat wilayah ini bisa jadi jalan masuk kekuatan asing yang ingin menerobos kedaulatan Indonesia. Di samping itu, wilayah bawah permukaan laut dapat menjadi kekuatan strategis angkatan laut khas Indonesia sebagai negara dengan corak maritim yang sangat kuat. Aktualisasi pilar ke lima PMD (membangun kekuatan pertahanan maritim) adalah menjamin terciptanya keamanan yang diterjemahkan dalam sebuah geostrategi Angkatan Laut dengan pembangunan kekuatan bawah permukaan laut sebagai *Center of Gravity* pertahanan Indonesia.

**Kata Kunci:** *Center of Gravity*, Geostrategi, Keamanan, PMD (Poros Maritim Dunia), UUV (*Unmanned Underwater Vehicle*)

**Abstract**—The discovery of a strange UUV (*Unmanned Underwater Vehicle*) in the form of a sea glider three times in Indonesian waters indicates a threat towards state sovereignty. Indonesia with its five pillars of the World Maritime Axis (PMD) is still struggling with issues of maritime threats often arise in the form of territorial violation, the pilferage of marine products, and other illegal activities. As an archipelagic country with a wide border gate of the sea, it is often difficult to control the violations occur. Indonesia has huge marine potential requires the attention of the state in order to create the protection from the threat of sovereignty in the maritime territory of the archipelago. Under sea level, including the seabed, is a component of the continental shelf that needs to be monitored, considering that this area can be a gateway for foreign powers who want to intrude on Indonesian sovereignty. In addition, the under-surface area can be a strategic strength for the Indonesian navy as a country with a very strong maritime style. The actualization of the fifth pillar of PMD (building maritime defense forces) is to ensure the realization of security which is transformed into a naval geostrategic with the development of under-surface forces as the *Center of Gravity* for Indonesian defense.

**Keywords:** *Center of Gravity*, Geostrategic, PMD (World Maritime Axis), Security, UUV (*Unmanned Underwater Vehicle*)

## Pendahuluan

Telah sama-sama kita ketahui begitu besarnya potensi maritim yang dimiliki Indonesia. Dari segi ketak geografis, kekayaan sumber daya, dan luas wilayah cakupannya, Indonesia dikenal dunia dengan sebutan negara maritim. Indonesia terletak di persilangan dua benua dan dua samudera, membuat wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Wilayah laut Indonesia dengan luas 3.544.743,9 km<sup>2</sup> yang merepresentasikan sekitar 65% dari seluruh luas wilayah Indonesia juga menyimpan kekayaan yang melimpah (Cassidy, et al., 2016). Pulau-pulau nusantara yang tersebar dalam 17 ribuan gugusan pulau terhubung satu sama lain dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Indonesia.

Visi Poros Maritim melalui lima pilar utamanya yaitu: i) pembangunan budaya maritim Indonesia; ii) penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut secara optimal untuk kepentingan rakyat; iii) pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim; iv) kerja sama maritim melalui diplomasi; dan v) pembangunan kekuatan pertahanan maritim (Cassidy, et al., 2016), merupakan sebuah grand strategi atas kesadaran maritim pemimpin bangsa. Kesadaran

akan takdir bahwa negara Indonesia sudah seharusnya menjadikan laut dan sektor kelautannya sebagai tumpuan hidup bernegara dalam bidang yang multidimensial. Ekonomi, politik, budaya, sosial, dan tentu saja pertahanan.

Visi Poros Maritim tersebut perlu diaktualisasikan melalui prioritas kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kelautan (*National Ocean Policy*) yang memuat program dan rencana pembangunan kelautan Indonesia dan arah kebijakan strategis kelautan nasional (Cassidy, et al., 2016). Pembangunan berorientasi kelautan tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi namun lebih menyadari hakikat stabilitas sebagai penjamin perkembangan tetap berjalan. Stabilitas berkaitan dengan keamanan yang mensyaratkan kebebasan atas ancaman-ancaman yang ada berimplikasi positif pada keberlangsungan hidup suatu bangsa. Terutama dalam pembangunan ekonomi, terciptanya keamanan memberikan ruang bagi suatu bangsa untuk terus berinovasi dan mengejar kepentingan nasionalnya.

Berkaitan dengan keamanan laut sebagai aspek stabilitas maritim, sudah tidak terhitung banyaknya pelanggaran-pelanggaran teritorial dihadapi bangsa

ini. Visi poros maritim dunia dengan lima pilarnya masih harus berbenturan dengan ancaman-ancaman maritim yang memungkinkan laju kebijakan-kebijakan maritim Indonesia menjadi terganggu, bahkan terancam. Ancaman-ancaman maritim tak jarang berupa ancaman kedaulatan yang sangat sensitif. TNI Angkatan Laut Indonesia memegang peran penting dalam penegakan kedaulatan NKRI dalam rangka terus menopang visi-visi strategis menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Tulisan ini mencoba menyajikan jawaban atas dua pertanyaan besar, yaitu:

1. Bagaimanakah geostegi Angkatan Laut Indonesia mengejawantahkan pilar ke lima dalam visi Poros Maritim Dunia?
2. Bagaimanakah urgensi pembangunan kekuatan bawah permukaan sebagai *center of gravity* pertahanan Indonesia?

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Mendeskripsikan geostrategi Angkatan Laut Indonesia dalam rangka pengejawantahan pilar ke lima visi Poros Maritim Dunia.
2. Mendeskripsikan urgensi pembangunan kekuatan bawah

permukaan sebagai *center of gravity* pertahanan Indonesia.

3. Memberikan sumbangsih akademis terhadap kajian ilmu strategi pertahanan laut serta bahan pengayaan bagi insan pertahanan Indonesia.

Pilar pembangunan kekuatan pertahanan maritim Indonesia mengamanatkan tugas kepada TNI Angkatan Laut sebagai *stakeholder* utama pertahanan. Diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman dalam rangk mencapai kemandirian maritim yang dicita-citakan dalam lima pilar Poros Maritim Dunia.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berpijak pada fungsionalisme struktural, realisme, positivisme, behaviorisme dan empirisme yang inintinya menekankan pada hal-hal yang bersifat kongkret, uji empiris, dan fakta-fakta yang nyata (Sarwono, 2006).

Data bersifat deskriptif, yaitu penyajiannya dapat berupa keterangan gejala-gejala yang dikategorikan, maupun bentuk lainnya seperti foto, dokumen,

artefak maupun catatan lapangan saat dilakukannya penelitian (Sarwono, 2006).

Hasil penelitian dijabarkan secara deskriptif, yaitu dengan penggambaran hubungan fenomena-fenomena yang ditemukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan penelitian bersumber dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, berita, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun dalam laman web *online* yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

### **Hasil dan Pembahasan**

Konsep Poros Maritim Dunia dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Konsep Poros Maritim Dunia (PMD) yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *East Asia Summit* (EAS) ke-9 di Myanmar pada 13 November 2014 berisikan pilar-pilar agenda pembangunan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia. Lima

pilar utama pembangunan PMD diantaranya (Humas, 2014):

Pilar pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan 17 ribu pulau dan dua pertiga wilayahnya adalah laut, bangsa Indonesia perlu menyadari identitasnya sebagai bangsa yang menggantungkan kesejahteraan masa depannya pada pengelolaan laut. Pengelolaan atas wilayah perairan perlu menjadi sebuah urgensi mengingat begitu potensialnya sumber kekayaan yang dikandung oleh laut. Pemahaman atas konsep negara maritim perlu menjadi agenda penanaman paradigma sejak dini dalam rangka menyatukan kerangka berpikir seluruh lapisan bangsa. Budaya maritim merupakan energi dasar dalam rangka mencapai cita-cita poros maritim dunia.

Pilar yang ke dua adalah menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Pemberdayaan nelayan yang optimal sebagai ujung tombak pengelolaan hasil laut merupakan sebuah urgensi dalam rangka mencapai kedaulatan pangan sumber laut. Sebagai landasan filosofis,

Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Merujuk pada amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 tersebut, pengelolaan sumber daya alam Indonesia termasuk kekayaan maritim digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Pilar ke tiga, memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Pembangunan infrastruktur menjadi ruh kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam mewujudkan nawacita. Infrastruktur dan konektivitas maritim harus menjadi prioritas sebagai pengejawantahan nilai-nilai kesatuan antar pulau-pulau yang tersebar di nusantara. Deklarasi Djuanda pada Desember 1947 menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia yang termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah NKRI. Infrastruktur maritim dan konektivitasnya memaknai bahwa laut merupakan penghubung dan bukan pemisah. Sehingga agenda pembangunan daerah pelosok negeri

mampu dijangkau dalam rangka pemerataan pembangunan nasional.

Ke empat, melalui diplomasi maritim, mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerjasama di bidang kelautan. Meredam konflik kelautan berkepanjangan harus menjadi agenda kerja sama internasional. Masalah seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut harus menjadi perhatian bersama untuk ditanggulangi dalam rangka menciptakan keamanan maritim di kawasan.

Ke lima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Pertahanan maritim merupakan pilar pamungkas untuk menopang keempat pilar lainnya. Pertahanan adalah asasi *survival* suatu bangsa untuk dapat tetap hidup, eksis, dan mampu bersaing menghadapi gempuran peradaban global.

Cita-cita dan agenda di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21.

Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa (Humas, 2014). Idealisme dalam ke lima pilar tersebut selayaknya memang menjadi urgensi mengingat secara *de facto* Indonesia terdiri dari 17.504 pulau dengan 2/3 wilayahnya merupakan perairan/laut. Sementara secara *de jure*, Indonesia adalah negara kepulauan yang telah ditetapkan berdasarkan konvensi UNCLOS 1982. Kelima pilar PMD tersebut sudah seharusnya mendapatkan porsi perhatian lebih karena potensi maritim yang begitu besar dapat menjadi tumpuan bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.

Indonesia dengan posisi strategisnya berada di antara dua benua dan dua samudera, wilayah perairan yang sibuk dengan lalu lintas ribuan kapal dagang internasional. Alur Laut Kepulauan Indonesia juga menjadi jalur penting pelayaran dunia dengan *choke point*-nya di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makassar. Letak strategis Indonesia dan potensi sumber daya kelautan yang melimpah merupakan berkah tak terhingga bagi kehidupan bangsa Indonesia. Namun terbukanya wilayah perairan Indonesia sebagai

bagian dari poros maritim dunia berpotensi sebagai ancaman konvensional karena dapat melibatkan Indonesia dalam persoalan-persoalan maritim (Hidayat & Ridwan, 2017). Karena geografis laut Indonesia yang terbuka, kerap kali menimbulkan banyak permasalahan berkaitan dengan pencurian sumber daya, aktivitas pelayaran ilegal, serta eksploitasi yang dilakukan pihak asing. Belum lagi konflik perbatasan laut yang sering muncul, serta penerobosan yang dilakukan pihak asing ke wilayah perairan Indonesia menggunakan kapal-kapal di permukaan, maupun menggunakan kapal selam dan *drone* laut atau *seaglider* di bawah permukaan laut.

Persoalan-persoalan maritim yang kerap kali muncul perlu menjadi perhatian, terlebih permasalahan tersebut berkaitan dan menyinggung kedaulatan negara. Kedaulatan adalah isu utama yang paling penting dalam pertahanan. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan NKRI adalah sebuah harga mati (Setpres, 2020).

Ancaman kedaulatan berkaitan dengan keamanan maritim meliputi segala aspek wilayah kelautan, tidak hanya di permukaan, namun juga di

bawah permukaannya. Dalam Undang-undang tentang kelautan Republik Indonesia dijelaskan bahwa kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bawah laut merupakan gerbang yang sangat terbuka dari risiko pelanggaran.

Pertama, aspek media yang begitu luas. Kolom air laut yang begitu besar memerlukan penjagaan ekstra, karena tidak hanya berkaitan dengan panjangnya namun juga tinggi kolom airnya dari dasar ke permukaan. Ke dua, sifat air atas jarak pandang menyulitkan pendeteksian yang optimal. Ketika terjadi penerobosan objek-objek asing melalui bawah permukaan akan cenderung tidak kasatmata, berbeda dengan objek-objek yang berada di atas permukaan dengan mudah dapat dideteksi bahkan dengan mata telanjang. Ke tiga, pertahanan bawah laut memiliki beberapa kendala dengan masih kurangnya alusista yang dimiliki oleh Indonesia dalam mempertahankan wilayah bawah laut (Legionosuko, Sumantri, & Purwanto, 2019).

Strategi pertahanan bawah permukaan laut Indonesia menjadi begitu penting untuk dipertanyakan kekuatannya ketika pertahanan laut kita 'kebobolan' tiga kali dalam kurun 3 tahun terakhir. Ketiga objek asing yang menerobos wilayah laut Indonesia ini adalah UUV (*Unmanned Underwater Vehicle*) atau AUV (*Autonomous Underwater Vehicle*) berbentuk *seaglider* yang diawali dengan penemuannya di perairan kepulauan Riau pada Maret 2019. Kemudian pada Januari 2020, penemuan serupa terjadi di perairan Jawa Timur. Terakhir, pada 26 Desember 2020 *seaglider* asing juga ditemukan di perairan Selayar.

*Unmanned Underwater Vehicle* (UUV) adalah kendaraan bawah permukaan air tanpa awak. Tanpa awak didefinisikan bahwa operator yang mengendalikan kendaraan di bawah permukaan air tidak berada di dalam kapal, namun kendali kapal di luar yang memungkinkan dari jarak yang jauh. Penggunaan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh ini dikembangkan untuk kegiatan militer dan penelitian. Dalam perkembangannya, kendaraan di bawah permukaan air tanpa awak menjadi relatif berteknologi tinggi dan mahal. Salah satu pendahulunya

adalah kapal-kapal listrik milik Jerman pada Perang Dunia I yang dilengkapi bahan peledak dan diarahkan ke kapal-kapal perang berukuran besar yang bergerak lambat (Munazid & Suwasono, 2017).

*Seaglider* ini merupakan kendaraan bawah air nirawak yang dikembangkan untuk pengukuran parameter oseanografi jangka panjang yang berkelanjutan untuk kepentingan penelitian ataupun pertahanan, jika pengamatan oseanografi tidak dapat dilakukan oleh teknologi penginderaan jauh seperti satelit (Purnomo, 2021). UUV ini memiliki kemampuan mengambil data *Multibeam* dan *Side Scan Sonar* yaitu pengambilan data kedalaman, citra dasar laut, CTD (*Conductivity Temperature Depth*) dan SVP (*Sound Velocity Profiler*). Data tersebut selain digunakan untuk kepentingan pemetaan laut, kepentingan industri kelautan juga untuk kepentingan militer seperti peta layer bawah laut pada untuk kapal selam (Purnomo, 2021).

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertapati menyatakan bahwa UUV asing tersebut yang ditemukan oleh nelayan semuanya dalam keadaan *malfunction* yang artinya ada kendala teknis internal di dalam sistemnya (Rahayu, 2021). Kondisi

tersebut kemudian menguatkan pandangan bahwa alutsista yang dimiliki Indonesia dalam mempertahankan wilayah bawah laut masih begitu kurang dan kecanggihannya belum mampu menyaingi negara-negara tetangga (Legionosuko, Sumantri, & Purwanto, 2019). Kondisi UUV yang ditemukan dalam keadaan rusak juga menimbulkan dugaan bahwa terdapat banyak UUV lainnya di bawah permukaan laut Indonesia yang belum terdeteksi.

Peneliti *Research and Operations on Technology & Society (ROOTS)* Riefqi Muna menyatakan, sebagai negara maritim yang strategis di tengah Indo-Pasifik, tindakan penerobosan itu dapat bermakna sebuah geopolitik dan merupakan isu sensitif bagi dinamika keamanan nasional Indonesia. Berkaitan dengan hubungan diplomasi di kawasan yang sedang mudah memanas, penemuan *seaglider* mengartikan telah terjadinya intrusi oleh asing atas wilayah kedaulatan negara Indonesia dalam bentuk aktivitas penerobosan batas negara (Rakhmatulloh, 2021).

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menyatakan, temuan tersebut merugikan kepentingan nasional dan berpotensi mengancam kedaulatan

Indonesia. *Seaglider* dengan fungsinya terkait intelijen dan pengamanan, memungkinkannya untuk mengetahui data dan informasi strategis menyangkut kedalaman dan lapisan laut yang tentu sangat berguna bagi pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

UUV sangat efektif digunakan untuk memperoleh data fisik kolom air sebuah perairan seperti suhu, tekanan, kadar garam serta arus, gelombang maupun kondisi dasar laut dalam durasi yang panjang untuk mengetahui karakteristik tertentu untuk berbagai kepentingan khususnya kepentingan yang terkait dengan bidang penelitian dan pertahanan (Purnomo, 2021). Periode jelajah UUV biasanya dapat mencapai beberapa tahun dan pola kerjanya adalah dengan mengirimkan perolehan data-data jelajah melalui satelit yang terhubung dengan pemiliknya dari tempat yang sangat jauh.

Dengan penemuan *seaglider* tersebut mengartikan bahwa dalam keamanan laut Indonesia masih ditemukan banyak celah rawan, baik di perbatasan maupun di perairan teritorial. Wilayah kelautan sebagai objek utama agenda poros maritim dunia masih menyisakan segudang ancaman

mutidimensial. Legionosuko, dkk (2019) menjelaskan hakikat ancaman digolongkan ke dalam dua bentuk yaitu ancaman militer dan ancaman nirmiliter. Di antara ancaman militer termasuk di dalamnya agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal atau perang saudara. Sementara ancaman nirmiliter termasuk di dalamnya ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum.

Dilihat dari sifat dan bentuknya, *seaglider* yang menerobos batas wilayah Indonesia ini dapat digolongkan ke dalam ancaman militer berupa pelanggaran wilayah dan spionase. Pelanggaran Wilayah merupakan suatu bentuk aktivitas satu pihak untuk memasuki wilayah tertentu milik pihak lain tanpa adanya izin (Legionosuko, Sumantri, & Purwanto, 2019). Pelanggaran wilayah dalam konteks militer dapat berupa penerobosan yang dilakukan menggunakan pesawat tempur maupun kapal-kapal perang negara lain. Pada dasarnya memang belum ada regulasi yang mengatur harus dan tidaknya izin bagi *seaglider* masuk ke wilayah suatu negara. KSAL Laksamana TNI Yudho

Margono menyatakan bahwa keberadaan *seaglider* ini belum diatur dalam peraturan negara (CNN, 2021). Selama ini aturan yang berkaitan dengan izin hanya berlaku bagi alat-alat beridentitas yang merupakan alat perang, sementara identitas *seaglider* identitasnya belum begitu jelas. Dalam hal ini penulis sepakat dengan KSAL Yudho bahwa keberadaan *seaglider* dapat mengintai kekayaan laut Indonesia sehingga perlu diberlakukannya aturan mengenai izin benda asing termasuk yang serupa dengan *seaglider* untuk menghindari ancaman militer lain berupa spionase dan ancaman-ancaman lainnya. Spionase berasal dari bahasa perancis yakni *espionnage* dengan arti pengintaian atau memata-matai. Sedangkan menurut terminologi, spionase adalah suatu praktik untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut (Legionosuko, Sumantri, & Purwanto, 2019). Spionase merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh intelijen untuk mendapatkan informasi atau rahasia militer dari suatu negara. Meskipun pada tiga *seaglider* tersebut belum ditemukannya bukti praktik spionase, dan

irisan lain dari beberapa ahli intelejen-militer meragukan adanya praktik spionase pada objek asing tersebut, namun dalam rangka memperkokoh pilar PMD ke 5 yaitu membangun kekuatan pertahanan maritim, tindakan preventif harus senantiasa diperhatikan untuk menanggulangi berbagai ancaman serius kedaulatan.

Upaya suatu negara untuk menghadapi berbagai ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negerinya dalam rangka melindungi dan menjaga kepentingan nasional bangsanya dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer merupakan sebuah pengertian dari konsep keamanan nasional (Darmono, 2010).

Kemanan nasional juga diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer, dan politik serta pengembangan diplomasi. Konsep ini menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dalam negara tersebut (Darmono, 2010).

Konsep keamanan bagi Indonesia tersurat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu "... melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ..... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”. Tujuan negara dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 mengamankan negara untuk hadir dalam upaya pengamanan nasional dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam rangka menjaga keamanan nasional sebuah negara menjalankan tugas pertahanan untuk menegakkan kedaulatan eksternal negara terhadap ancaman eksternal dengan menggunakan kekuatan militer.

Lebih dalam mengenai keamanan nasional, konsep keamanan maritim menggambarkan lebih kongkret kondisi ancaman konvensional dalam kajian kelautan yang dihadapi bangsa Indonesia di tengah cita-cita PMD.

Secara garis besar, keamanan maritim didefinisikan sebagai kondisi di mana tidak ada "ancaman" maritim (*absence of threats*) seperti sengketa antar negara; aksi terorisme di laut; pembajakan; perdagangan narkoba, manusia, dan barang-barang selundupan; proliferasi senjata; *IUU fishing (illegal, unreported, and unregulated fishing)*; kejahatan lingkungan; serta bencana dan kecelakaan laut. Definisi lain melengkapi

pemaknaan keamanan maritim yang lebih dari sekedar *absence of threats*, tetapi juga termasuk kondisi yang diiringi oleh terciptanya stabilitas di wilayah kelautan (Cassidy, et al., 2016).

Karakteristik keamanan maritim di antaranya sebagai berikut (Cassidy, et al., 2016): (i) ancaman terhadap keamanan maritim tidak terikat batas-batas negara, dan karena itu membutuhkan kerja sama internasional; (ii) identifikasi ancaman dipengaruhi oleh sudut pandang keamanan nontradisional karena lingkup ancaman bersifat luas, tidak hanya berasal dari kekuatan militer, dan berfokus pada aktor negara saja; dan (iii) ditentukan oleh konstruksi keamanan suatu negara berdasarkan persepsi akan apa yang dianggapnya berpotensi mengancam stabilitas keamanan maritim. Keamanan maritim menyediakan ruang bagi ancaman dengan lingkup sifat yang luas; tidak terbatas militer, namun juga nirmiliter; tidak hanya aktor Negara, namun juga aktor non-negara, yang berpotensi mengancam kedaulatan maritim.

Visi Poros Maritim Dunia merupakan upaya aktualisasi geostrategis Indonesia yang tercipta dari upaya pengelolaan potensi maritim Indonesia baik secara ekonomis bagi

kesejahteraan dan strategis bagi pertahanan dan keamanan. Pilar ke lima PMD, pembangunan kekuatan pertahanan maritim perlu menjadi perhatian mengingat urgensi di dalamnya, bahwa pertahanan laut berimplikasi pada kokohnya pilar-pilar lainnya; pembangunan budaya maritim, penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, serta kerjasama bidang kelautan.

Komponen kunci pertahanan maritim adalah TNI AL. Dalam menyikapi ancaman yang ada, untuk menciptakan stabilitas dan keamanan nasional, TNI sebagai *stakeholder* utama pertahanan laut perlu menciptakan strategi terbaru yang update dengan mempertimbangkan hamparan relief muka bumi Indonesia. Strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan tujuan, dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita suatu bangsa merupakan definisi umum dari geostrategi (Sulisworo, Wahyuningsih, & Arif, 2012).

Konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi

konsep strategi yang didasarkan pada kondisi metode, atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan Negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.

Sistem pertahanan negara Indonesia disusun berdasarkan konsep geostrategi sebagai negara kepulauan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa pertahanan negara disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Merespon kemungkinan ancaman maritim yang datang melalui bawah permukaan laut, strategi yang semestinya dilakukan TNI AL adalah dengan pembangunan kekuatan bawah permukaan. Kemampuan deteksi dini objek asing dan *unlawful activities* di bawah permukaan harus ditingkatkan. Secara umum, meningkatkan kemampuan personil dan alutsista yang dapat dioptimalkan dalam pengamanan wilayah bawah laut Indonesia adalah sebuah urgensi logis yang harus menjadi perhatian geostrategi Indonesia. Dalam

kebijakan pertahanan terdapat tiga komponen yang saling terkait yakni program pertahanan, anggaran pertahanan, dan pengadaan persenjataan (Legionosuko, Sumantri, & Purwanto, 2019). Pemusatan ketiga komponen tersebut untuk pembangunan kekuatan pertahanan bawah permukaan merupakan langkah strategis mengingat ancaman yang mungkin saja datang dari bawah permukaan dapat menjadi gangguan serius bagi kedaulatan. Lebih jauh, kita harus menyadari kodrat sebagai bangsa yang dianugerahi hamparan laut yang begitu luas. Maka geostrategi yang menitikberatkan pada keberadaan laut harus menjadi menu utama dalam sistem pertahanan Indonesia, termasuk pembangunan kekuatan bawah permukaan.

Fungsi pertahanan bawah permukaan adalah untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh aspek wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang mampu melindungi kedaulatan NKRI, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia dari setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri (Legionosuko, Sumantri, & Purwanto, 2019). Pertahanan bawah permukaan dapat dijadikan *center of*

*gravity* sebagai aktualisasi geostrategi Angkatan Laut Indonesia dalam rangka aktualisasi pilar ke lima PMD, membangun kekuatan pertahanan maritim.

Konsep *Center of Gravity* ala Clausewitz's di era kontemporer dalam terjemahan buku *On War* oleh Howard dan Paret (1976) dimaknai sebagai pusat dari segala kekuatan dan pergerakan, di mana semuanya bergantung. *Joint Publication 5-0* mendefinisikan *center of gravity* sebagai "sumber kekuatan yang memberikan kekuatan moral atau fisik, kebebasan bertindak, atau keinginan untuk bertindak." Definisi COG yang diusulkan Eikmeier menyatakan bahwa "*center of gravity* adalah entitas utama yang memiliki kemampuan yang melekat untuk mencapai tujuan." (Eikmeier, 2010) Dari berbagai definisi tersebut dapat ditarik makna *center of gravity* sebagai kesatuan sumber kekuatan atas kebebasan bertindak dalam rangka mencapai tujuan. Kata kuncinya adalah sumber kekuatan. Sebagai negara maritim, dengan dominannya luas laut berbanding daratan, sudah seharusnya sumber kekuatan pertahanan negara bertumpu pada sektor kelautan. Dalam tulisan ini, penulis menawarkan pembangunan kekuatan bawah

permukaan laut sebagai sumber kekuatan atau *center of gravity* bagi pertahanan Indonesia. Aspek geostrategi atas kesadaran bangsa maritim, pengerahan kekuatan bawah permukaan merupakan pola pertahanan yang khas dimiliki oleh Indonesia. Disamping penangkalan atas musuh-musuh yang masuk melalui laut baik di permukaan ataupun bawah permukaan, pembangunan kekuatan bawah permukaan ini merupakan bentuk pertahanan paripurna bagi negara kepulauan seperti Indonesia.

Beberapa alasan mengenai urgensi pembangunan kekuatan pertahanan bawah laut yang dikemukakan oleh Mayor Jenral TNI Jonni Mahroza di antaranya (Mahroza, 2021):

1. Bawah laut dapat dijadikan pusat pertahanan yang sulit untuk terdeteksi. Posisi dan mobilitasnya lebih dapat dirahasiakan tanpa perlu menyiapkan dan mencari samaran seperti halnya di darat.
2. Teknologi pertahanan bawah laut akan sulit dihancurkan. Ketika segala bentuk teknologi yang dibangun di darat maupun udara mampu dapat hancur seketika, kekuatan bawah laut relatif sulit dihancurkan karena letaknya yang

tersembunyi dan sulit dijangkau musuh.

3. Luasnya yang dominan, posisi dan mobilitas kekuatan bawah permukaan laut akan lebih leluasa diatur untuk mampu memberikan perlindungan objek-objek di permukaan.
4. Kekuatan bawah laut dapat diproyeksikan untuk penyerangan berbagai sasaran. Kekuatan bawah laut mampu menyerang kapal permukaan, pesawat di udara, atau sasaran di darat sekalipun.
5. Pertahanan bawah laut dapat menjadi pertahanan terakhir, ketika semua objek darat telah dihancurkan oleh musuh. Pertahanan bawah laut dapat menjadi harapan dalam rangka membalikkan keadaan perang, dan penentu kemenangan perang.

Pembangunan kekuatan bawah permukaan sebagai *center of gravity* pertahanan Indonesia, memungkinkan percepatan pencapaian visi poros maritim dunia yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Pintu masuk paling terbuka bagi musuh Indonesia adalah laut. Laut yang maha luas akan sulit untuk diawasi dan tidak logis untuk dipagari. Namun pembangunan kekuatan pertahanan

bawah laut dapat menjadi strategi untuk mengoptimalkan kontrol laut terutama penangkalan ancaman-ancaman yang mengganggu kedaulatan NKRI.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Indonesia dengan visi Poros Maritim Dunia belum dapat terlepas dari berbagai ancaman maritim. Relief hamparan permukaan bumi Indonesia bagaikan dua sisi mata uang yang mewawarkan segudang potensi kesejahteraan juga menghadirkan berbagai gangguan stabilitas. Pilar ke lima dalam visi Poros Maritim Dunia mengisyaratkan penguatan pertahanan maritim sebagai penjamin terciptanya stabilitas dan keamanan maritim. TNI Angkatan Laut beserta *stakeholder* lainnya perlu memperhatikan pembangunan kekuatan pertahanan bawah permukaan sebagai sebuah geostrategi mengingat urgensinya atas respon ancaman yang berpotensi terjadi melalui gerbang bawah permukaan laut, juga berbagai kelebihanannya diterapkan sebagai *center of gravity* pertahanan nasional.

Konsep strategis yang ditawarkan Mayor Jendral TNI Jonni Mahroza mengenai geostrategi bawah permukaan diantaranya (Mahroza, 2021):

1. Pertama, gagasan untuk memprioritaskan kemampuan akuisisi kapal selam canggih, yang dilengkapi peluru kendali yang mampu menyerang objek di darat dan udara, bila perlu kapal selam bertenaga nuklir yang mampu menyelam dalam durasi yang panjang.
2. Ke dua, kepemilikan *drone* bawah air laut untuk *surveillance* dan serangan taktis.
3. Ke tiga, pengayaan infrastruktur bawah laut, termasuk pangkalan yang *invisible* dari mata-mata musuh.
4. Ke empat, pengembangan riset dan pemetaan kontur bawah permukaan beserta penelitian persenjataan bawah laut.
5. Ke lima, *political will* dari semua lapisan terutama pemegang *stakeholder* legislatif dan eksekutif harus hadir dalam aktualisasi geostrategi pembangunan kekuatan pertahanan bawah permukaan ini.

Penerapan geostrategi ini bukan menjadi pengganti sistem Hankamrata sebagai ruh pertahanan negara, namun melengkapi dan menguatkannya dengan menyesuaikan postur maritim Indonesia.

Dengan pembangunan ini, seluruh *stakeholder* harus bersiap dengan penambahan kuantitas personel angkatan laut, dan mulai bertransformasi menjadi bangsa maritim sesungguhnya dengan memfokuskan sumber kekuatan atau *center of gravity* pada aspek-aspek kelautan, terutama pertahanan bawah permukaan.

#### Daftar Pustaka

- Cassidy, F., Samosir, J. P., Oktarossa, D., Prasetyo, E. W., Nugroho, F. A., Fitri, W., & Putro, R. A. (2016). *Diplomasi Poros Maritim: Keamanan dalam Perspektif Politik Luar Negeri*. Jakarta: Pusat P2K-OI.
- CNN. (2021, Januari 04). *KSAL: Tak Ada Aturan Soal Operasional Seaglider di Indonesia*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://ccnindonesia.com/nasional/2021010455716-20-589324/ksal-tak-ada-aturan-soal-operasional-seaglider-di-indonesia>
- Darmono, B. (2010). Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, XV (1), 7.
- Eikmeier, D. C. (2010). Redefining the Center of Gravity. *JSQ Issue* 59, 156.
- Hidayat, S., & Ridwan. (2017). Kebijakan Poros Maritim dan Keamanan Nasional Indonesia: Tantangan dan Harapan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 7, No. 3, 112.
- Humas. (2014, November 14). *Pidato Presiden RI Joko Widodo pada KTT ke-9 Asia Timur, di Nay Pi Taw, Myanmar, 13 November 2014*. Retrieved from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: Humas. 2014. *Pidato Presiden RI Joko Widodo pada KTT ke-9 Asia Timur*<https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar-13-november-2014/>
- Legionosuko, T., Sumantri, S. H., & Purwanto. (2019). *Pertahanan Bawah Laut Indonesia*. Bogor: Universitas Pertahanan.
- Mahroza, J. (2021, Januari 04). *Membangun Kekuatan Pertahanan Unggul dan Sustainable dari Bawah Laut*. Retrieved from Antaranews: <https://antaranews.co/berita/1926704/membangun-kekuatan-pertahanan-unggul-dan-sustainable-dari-bawah-laut>
- Munazid, A., & Suwasono, B. (2017). *Perancangan Kapal Selam Tanpa Awak (UUV/ Unmanned Underwater Vehicle) Sebagai Sarana Observasi Bawah Air. Laporan Penelitian Prodi Teknik Perkapalan Universitas Hang Tuah Surabaya*, 1.
- Purnomo, J. H. (2021). Membangun Teknologi Pertahanan Tanpa Awak. *Cakrawala Edisi* 451, p. 34.
- Rahayu, L. S. (2021, Januari 5). *Pakar Sebut Seaglider 3 Kali Ditemukan di Laut RI, Ini Yang Mesti Diwaspadai*. Retrieved from detikcom: <https://news.detik.com/berita/d-5321210/pakar-sebut-seaglider-3-kali-ditemukan-di-laut-ri-ini-yang-mesti-diwaspadai>
- Rakhmatulloh. (2021, Januari 05). *Temuan Drone Bawah Laut Sudah Tiga Kali, Perlu Perhatian Serius*. Retrieved from Sindonews.com: <https://nasional.sindonews.com/read290340/12/temuan-drone>

bawah-laut-sudah-tiga-kali-perlu-  
perhatian-serius -1609808463

Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Setpres, B. (2020, Januari 23). *Presiden Jokowi Tegaskan Kedaulatan NKRI Harga Mati*. Retrieved from Presiden RI: <https://www.president.go.id/siaran-pers/president-jokowi-tegaskan-kedaulatan-harga-mati/>

Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., & Arif, D. B. (2012). *Geostrategi Indonesia. Bahan Ajar Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional Universitas Ahmad Dahlan, 2*.